



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS ARSITEKTUR SPBE



de balaks



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

01.

**PERUBAHAN
PARADIGMA TATA
KELOLA**

02.

**TATA KELOLA
PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK**

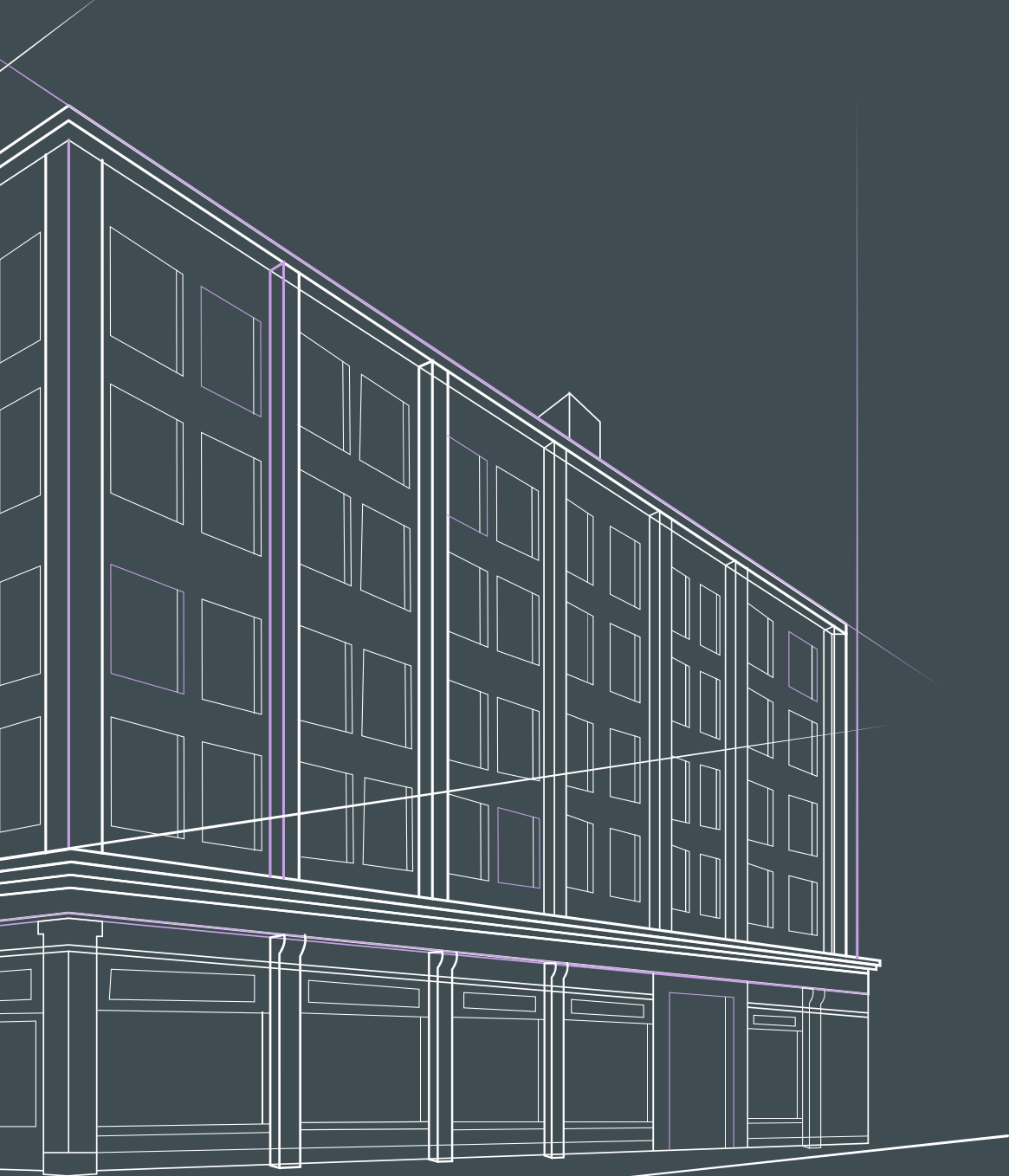
03.

**KERANGKA KERJA
EKOSISTEM DIGITAL**

04.

**TAHAPAN PENERAPAN
SPBE**





1

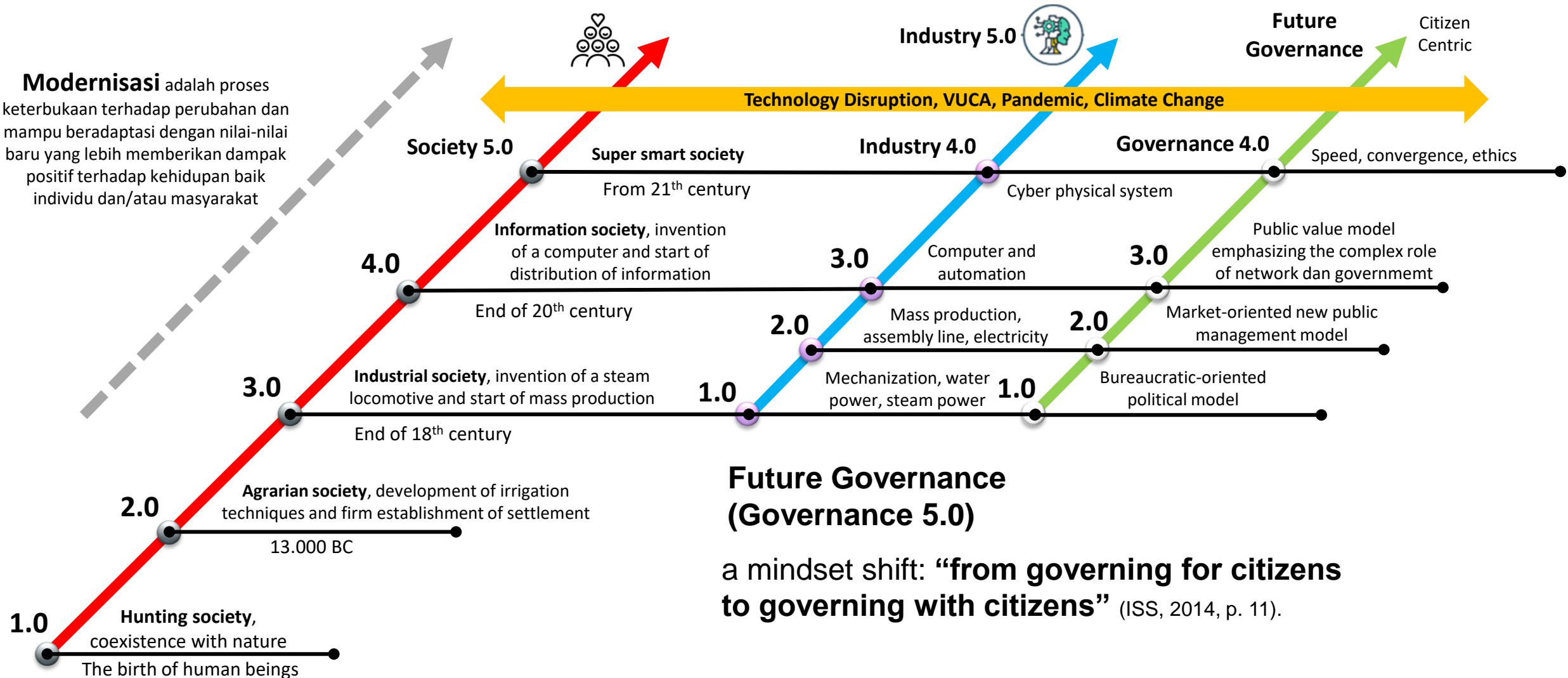
**PERUBAHAN
PARADIGMA
TATA KELOLA**



PPERUBAHAN PARADIGMA SOCIETY, INDUSTRY, GOVERNANCE

Multi-dimensional Transformation

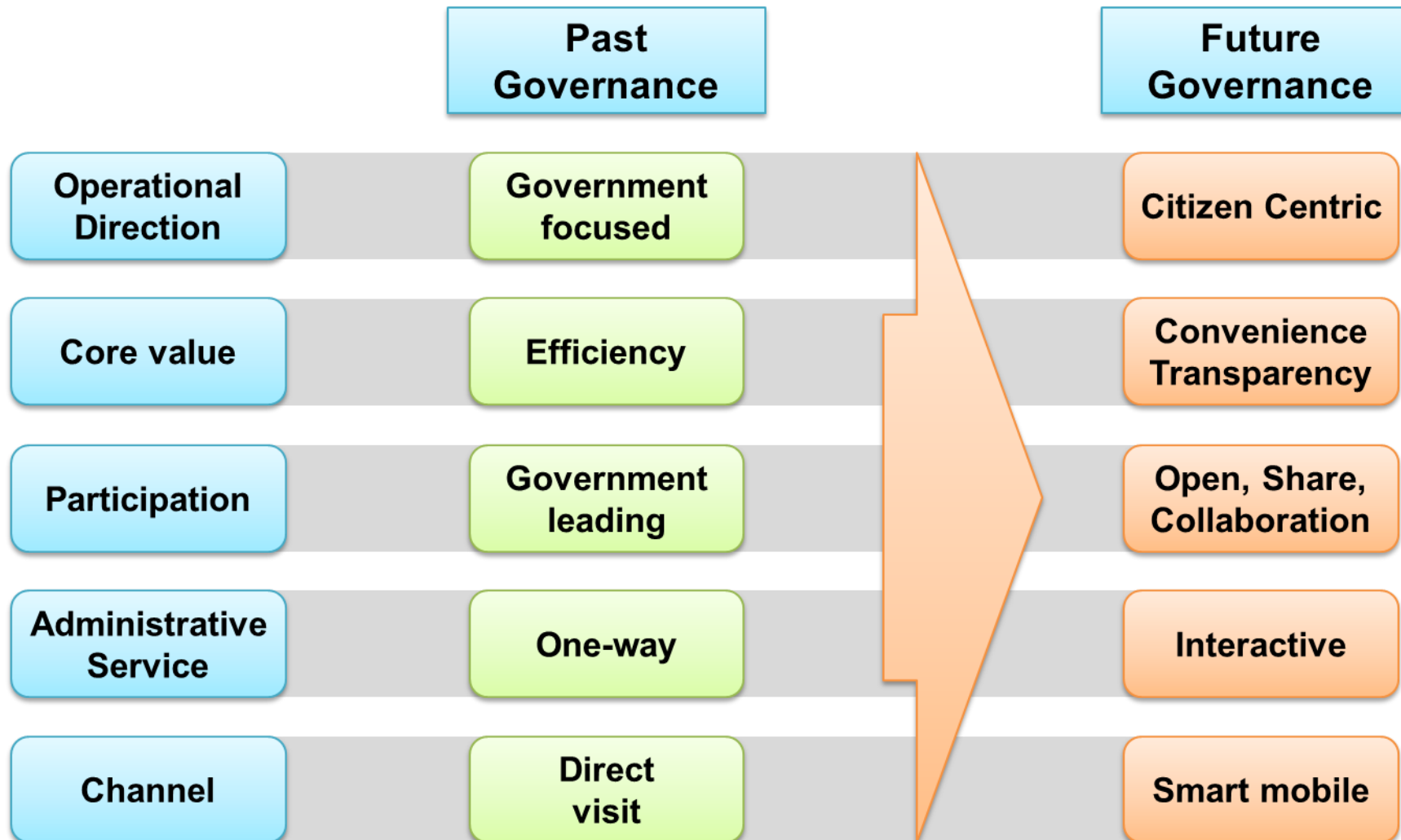
Modernisasi adalah proses keterbukaan terhadap perubahan dan mampu beradaptasi dengan nilai-nilai baru yang lebih memberikan dampak positif terhadap kehidupan baik individu dan/atau masyarakat



Future Governance (Governance 5.0)

a mindset shift: "from governing for citizens to governing with citizens" (ISS, 2014, p. 11).

PERUBAHAN PARADIGMA SOCIETY, INDUSTRY, GOVERNANCE



TRANSFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN



“Tidak boleh lagi sesuatu aparatur negara tak lancar, karena memang salah organisasinya, dan tidak boleh lagi orang bekerja pada aparatur negara dengan secara lenggang-kangkong, malas-malasan, ngantuk, atau mementingkan kepentingan sendiri dengan jalan korupsi waktu atau korupsi uang”

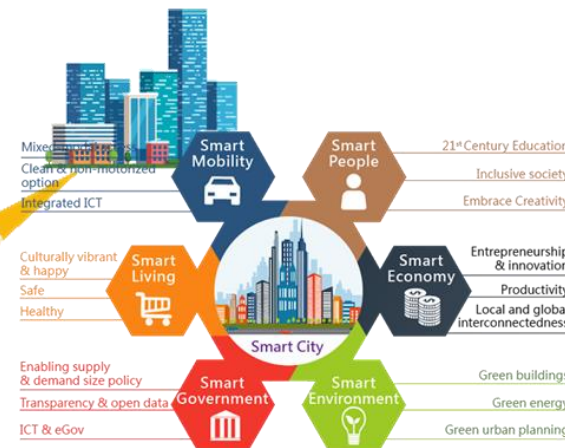
Soekarno, Presiden RI ke-1
17 Agustus 1959
“Penemuan Kembali Revolusi Kita”

Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, responsif, dan adaptif

Governance 4.0
4th generation administrative model
with emphasis on speed,
convergence, and ethics

Transformation Leap

Pelayanan Publik



Manajemen Kerja

Peningkatan Kualitas SDM

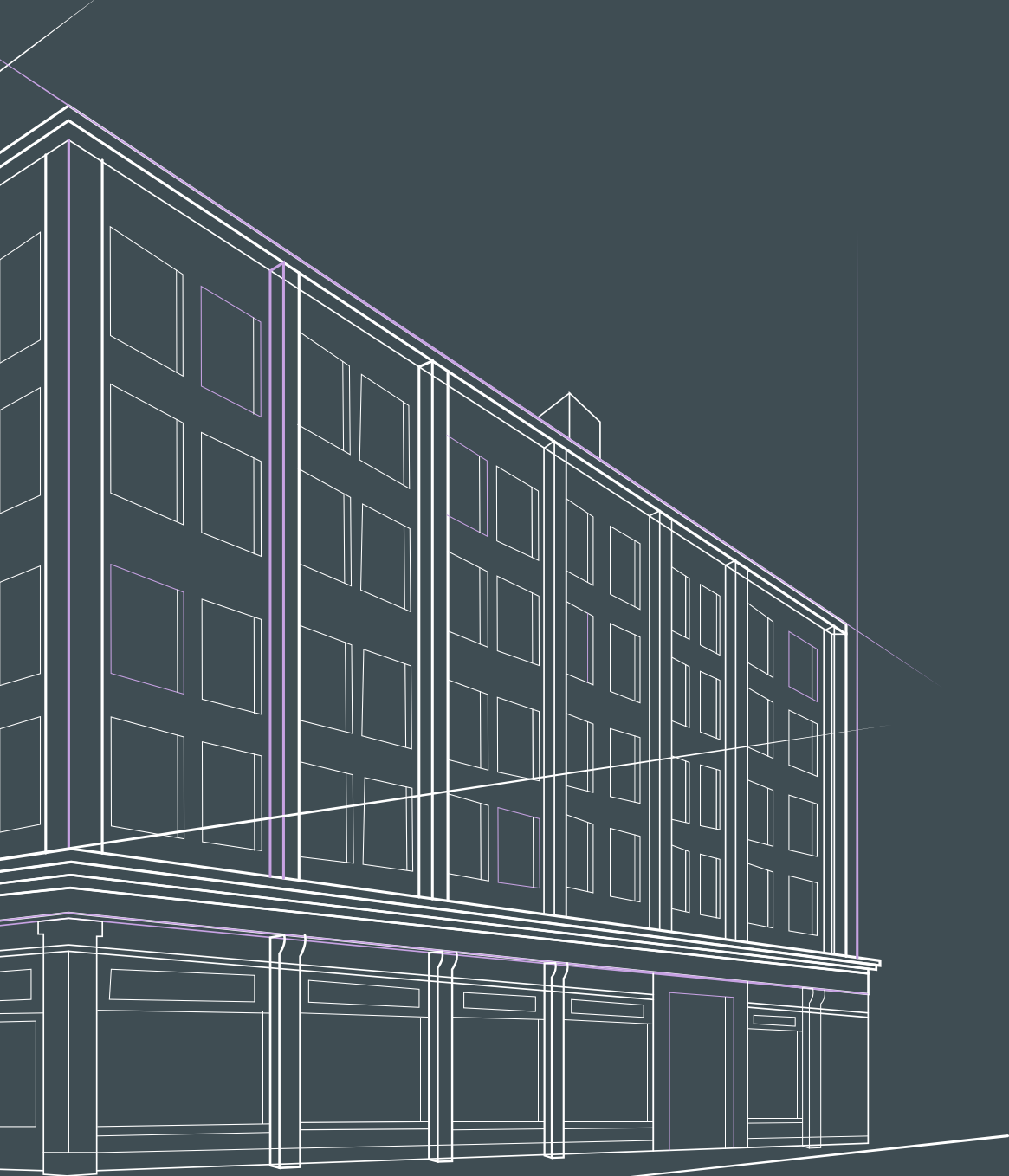
INTEGRITAS

KINERJA
PELAYANAN

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Penyederhanaan Birokrasi

Governance 1.0
Bureaucratic-oriented
political model

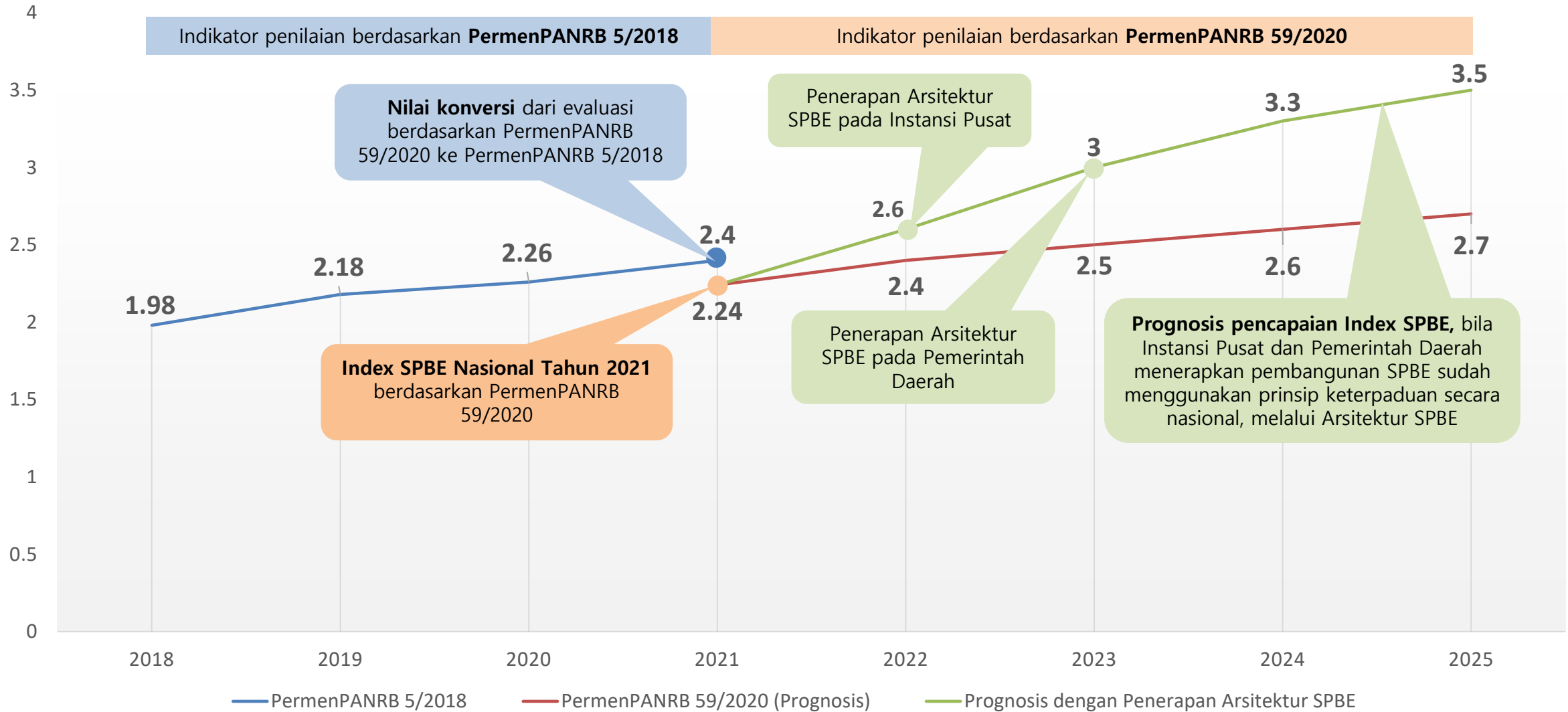


2

**TATA KELOLA
PEMERINTAHAN
BERBASIS
ELEKTRONIK**



PERKEMBANGAN PENERAPAN SPBE (Indeks Evaluasi SPBE)



Kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi

ARSITEKTUR SPBE

(Enterprise Government Architecture)

- Kementerian Bappenas (domain data dan informasi),
- Kementerian Kominfo (domain aplikasi dan infrastruktur TIK),
- BSSN (domain keamanan informasi)
- Kementerian PANRB (domain proses bisnis dan layanan digital)

Target penerapan Arsitektur SPBE, untuk **Instansi Pusat** hingga tahun 2023 dan untuk **Pemerintah Daerah** hingga tahun 2024

NON-STANDARD



DUPLICATION



SILO



- 27.400 Aplikasi yang berpotensi duplikasi.*
- 2700 pusat data/ruang server.*
- Terjadinya pemborosan anggaran akibat terbangunnya sistem yang silo dan tidak terintegrasi mengingat setiap instansi membangun aplikasi pemerintahan sendiri.
- Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang transparan, cepat, dan efektif.



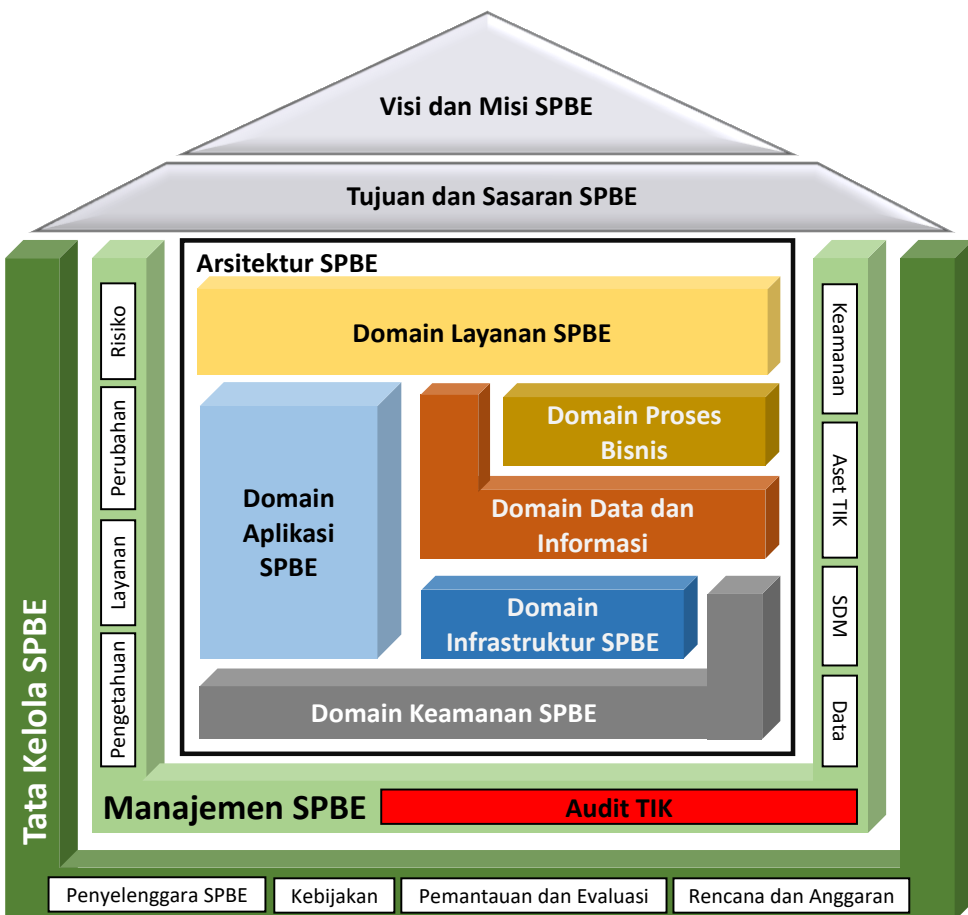
* Data Kementerian KOMINFO

INTEGRATED GOVERNMENT & PUBLIC SERVICES



TRANSFORMASI DIGITAL

KERANGKA KERJA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK



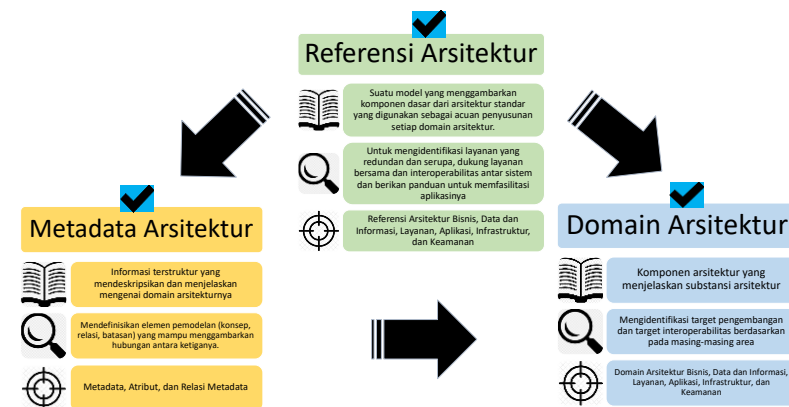
PRINSIP

- Efektivitas
- Keterpaduan**
- Kesinambungan
- Efisiensi
- Akuntabilitas
- Interoperabilitas
- Keamanan

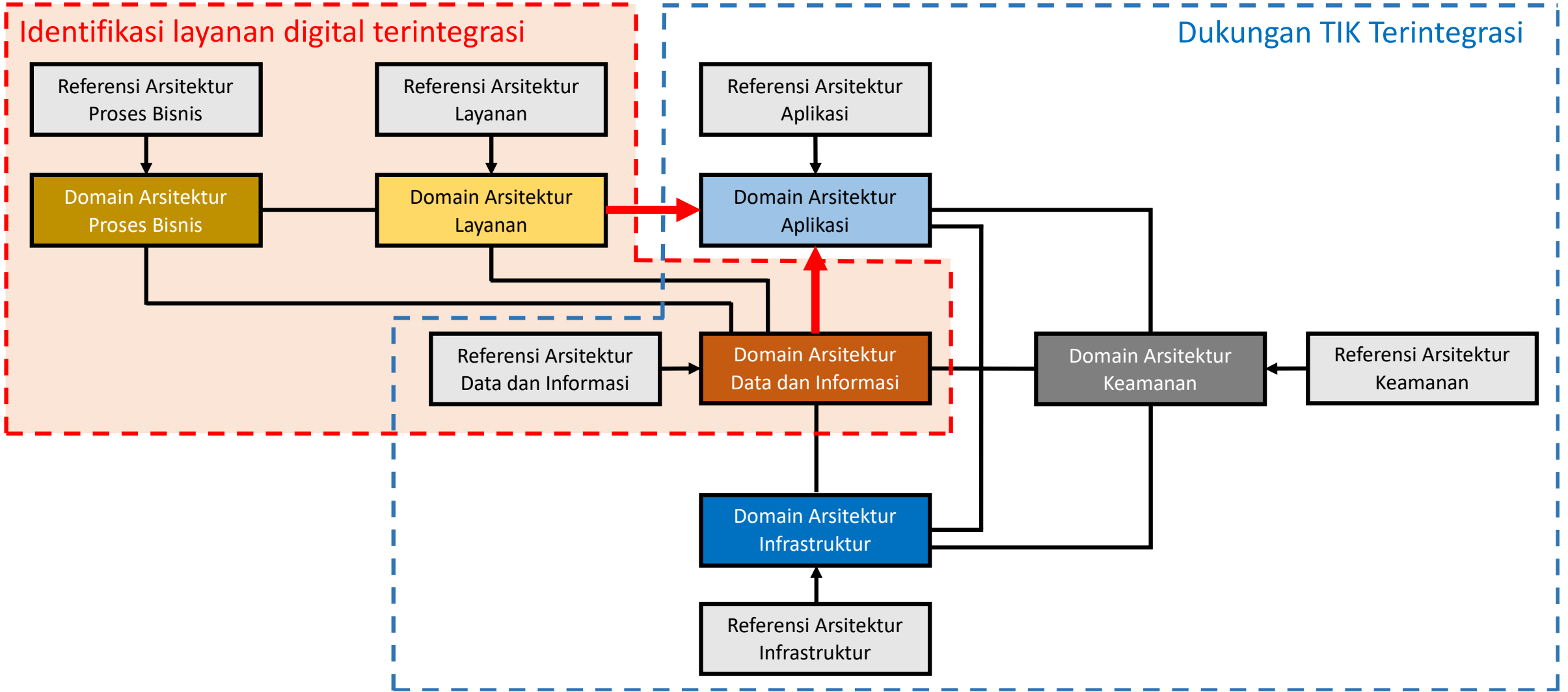
MANFAAT



-  Menghilangkan tumpang tindih fungsi bisnis pemerintahan
-  Menghilangkan duplikasi aplikasi dan infrastruktur TIK, serta memperkuat Keamanan Informasi
-  Menerapkan **standardisasi TIK dan standarisasi kualitas layanan digital Nasional (Service Level Agreement)**
-  Berbagi data dan informasi sesuai kebijakan **Satu Data Indonesia**
-  Memudahkan **integrasi layanan pemerintah**, sehingga menumbuhkan-kembangkan **inovasi proses bisnis** dan layanan baru
-  Meningkatkan keselarasan perencanaan dan penganggaran SPBE, sehingga **meningkatkan efisiensi dan efektivitas penerapan SPBE**



KETERKAITAN ANTAR DOMAIN DALAM KERANGKA KERJA ARSITEKTUR SPBE



Proses Bisnis

- Pemetaan proses bisnis utama pada level instansi.
- Memberikan indikasi awal mengenai keterkaitan proses antar instansi.

Layanan

- Identifikasi layanan baik administrasi pemerintahan maupun layanan publik.
- Memberikan gambaran awal alur layanan dan informasi yang dibutuhkan.

Data dan Informasi

- Pemetaan data dan informasi yang dibutuhkan.
- Pemetaan sumber data dan sumber informasi yang dapat saling berkaitan.

Aplikasi

- Pemetaan aplikasi yang dapat saling berkaitan.
- Memberikan potensi integrasi aplikasi pemerintahan.

Infrastruktur

- Memudahkan penyelarasan pemilihan, perencanaan, implementasi, pemeliharaan, dan siklus hidup TI secara keseluruhan

Keamanan

- Menyelaraskan standard keamanan dan aksesibilitas antar aplikasi dan basis data.

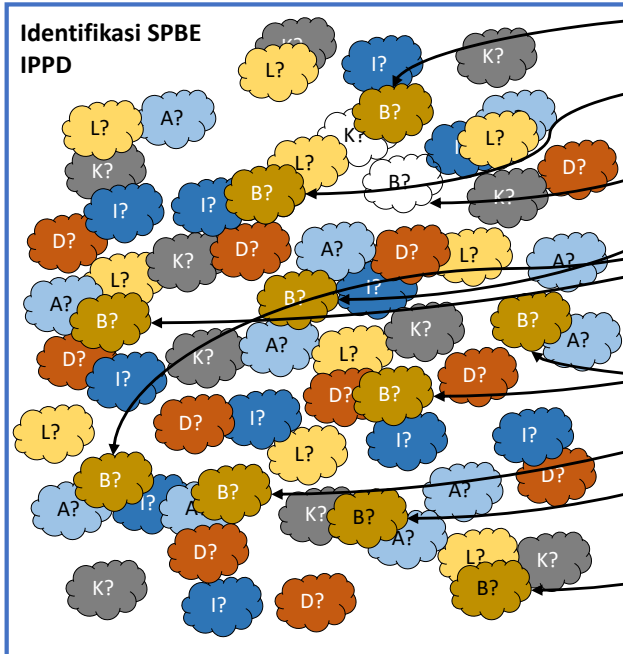
PROSES PENYUSUNAN ARSITEKTUR SPBE

- Peraturan dan perundang-undangan
- Kajian/referensi teknologi TIK, dll

- RJPN, RPJMN
- RPJMD/Renstra
- Katalog Data, Aset TIK
- Monitoring dan Evaluasi
- Audit TIK, dll

Visi dan Misi Penyelenggaraan SPBE

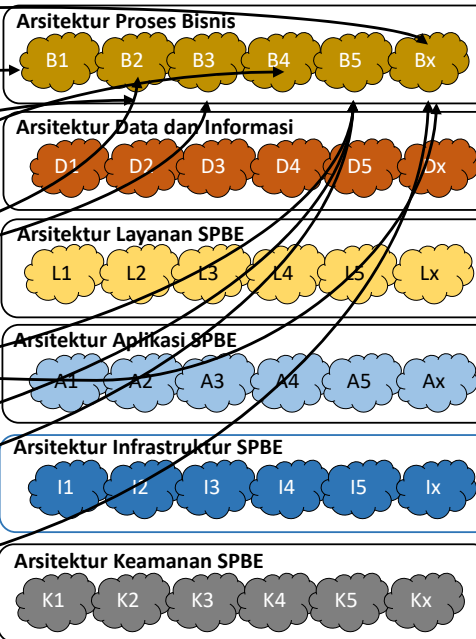
1



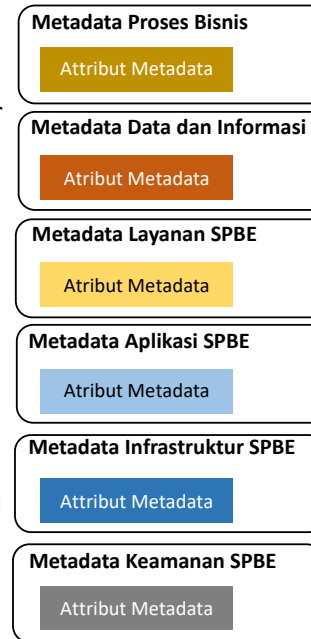
2

Pengelompokan Berdasarkan Referensi Arsitektur yang telah ditetapkan dalam Arsitektur SPBE Nasional

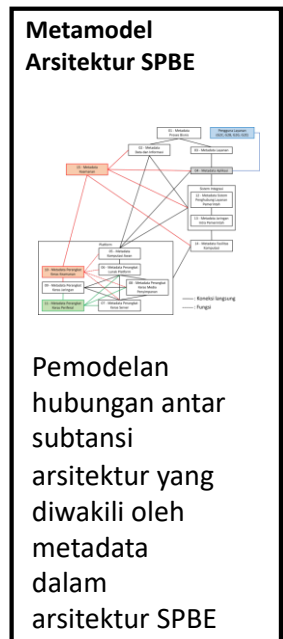
3



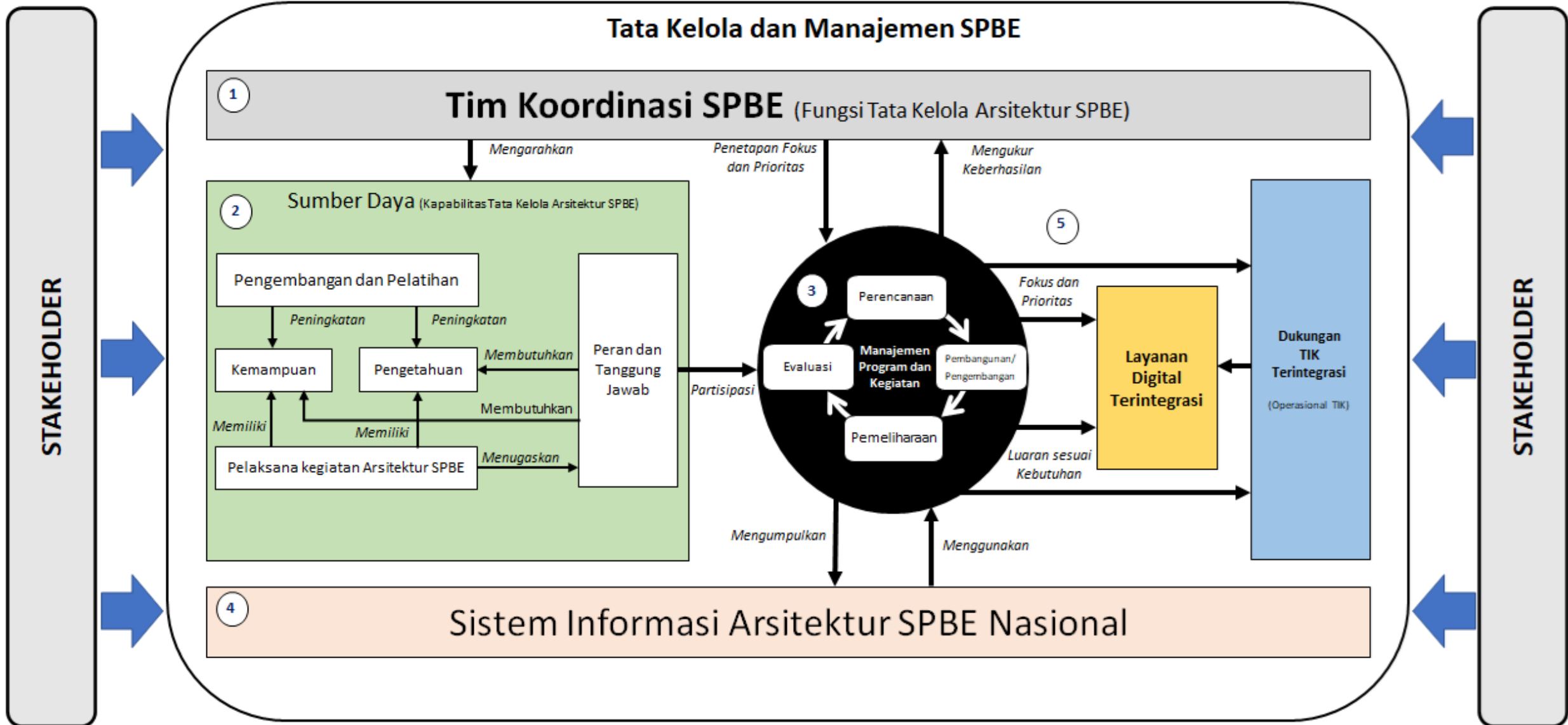
Pemodelan subtansi arsitektur setiap domain menjadi metadata dan atributnya



Pemodelan keterhubungan metadata dalam arsitektur SPBE secara keseluruhan



Arsitektur SPBE



ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ARSITEKTUR SPBE NASIONAL

Target inisiatif strategis pada Rancangan Perpres Arsitektur SPBE Nasional (2022 – 2025)



Pelayanan Publik

Pelayanan Administrasi Pemerintahan

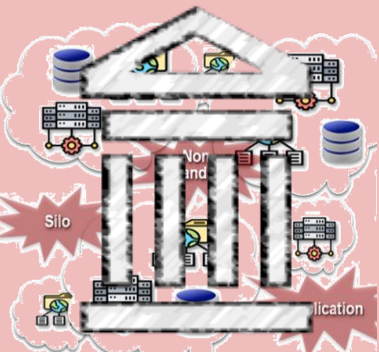
TRANSFORMASI DIGITAL MELALUI PENERAPAN SPBE



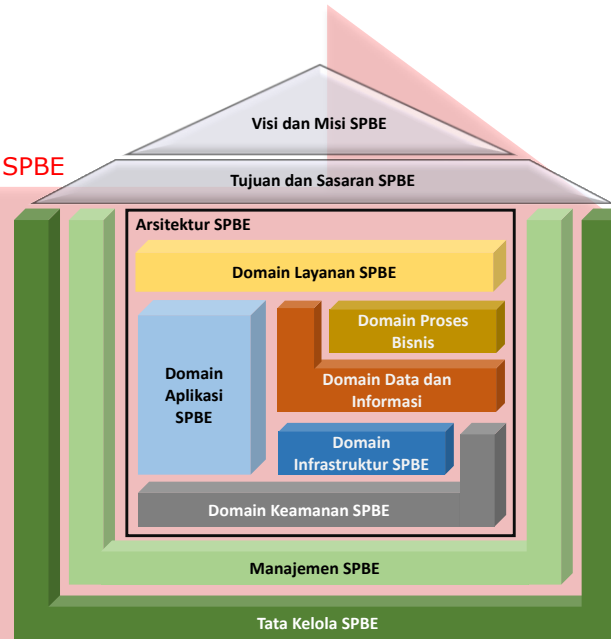
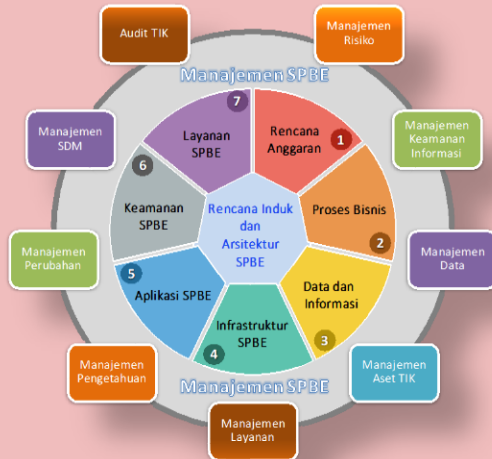
- Menghilangkan tumpang tindih fungsi bisnis pemerintahan
- Menghilangkan duplikasi aplikasi dan infrastruktur TIK, serta memperkuat Keamanan Informasi

KERANGKA SPBE

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 95 TAHUN 2018 TENTANG SPBE



Old Public Administration

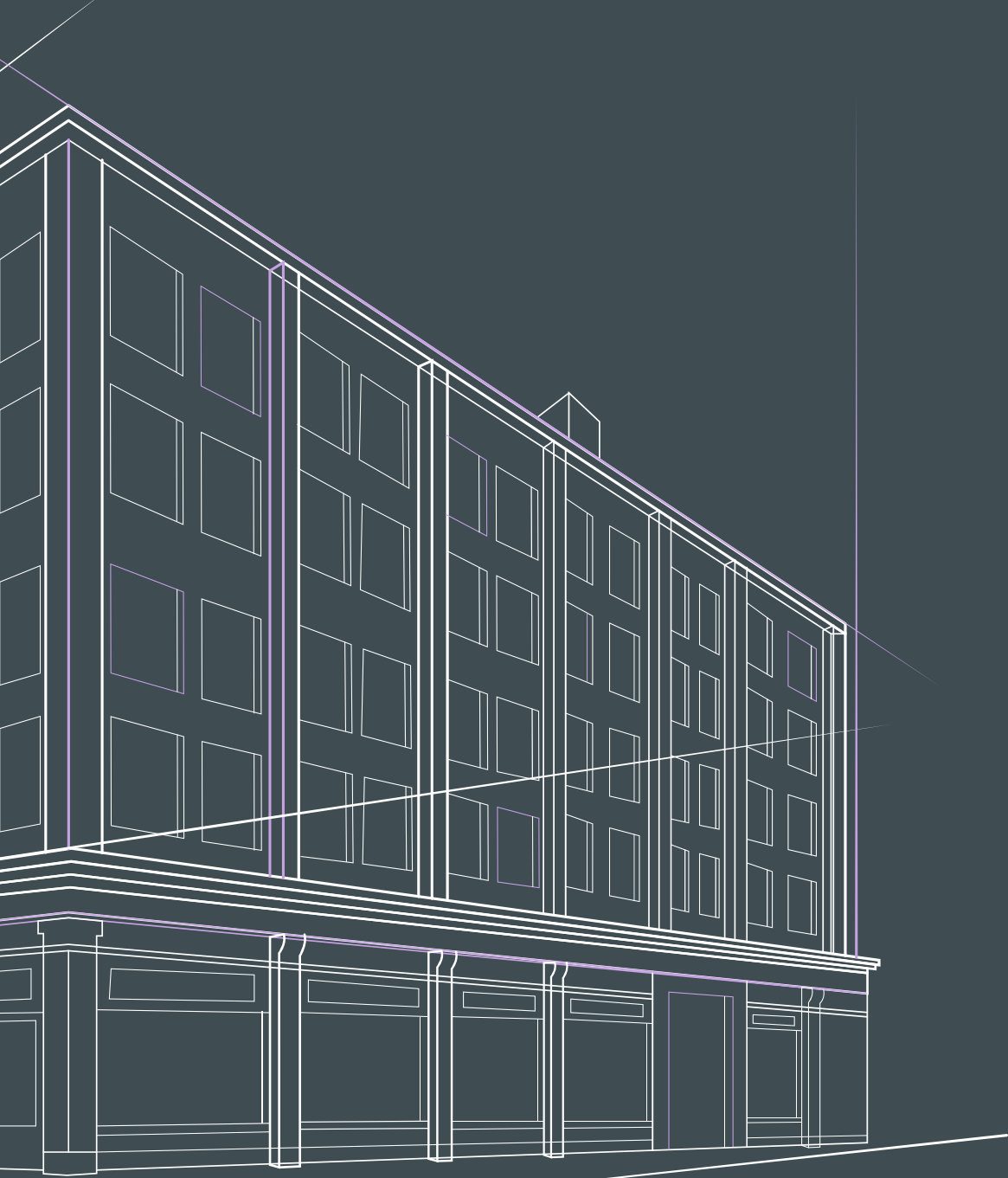


ARSITEKTUR SPBE



- Menerapkan **standarisasi TIK dan standarisasi kualitas layanan** digital Nasional (*Service Level Agreement*)
- Berbagi data dan informasi sesuai kebijakan **Satu Data Indonesia**

- Memudahkan **integrasi layanan pemerintah**, sehingga menumbuhkan-kembangkan **inovasi proses bisnis** dan layanan baru



3

**KERANGKA KERJA
EKOSISTEM
DIGITAL**



KERANGKA KERJA EKOSISTEM DIGITAL

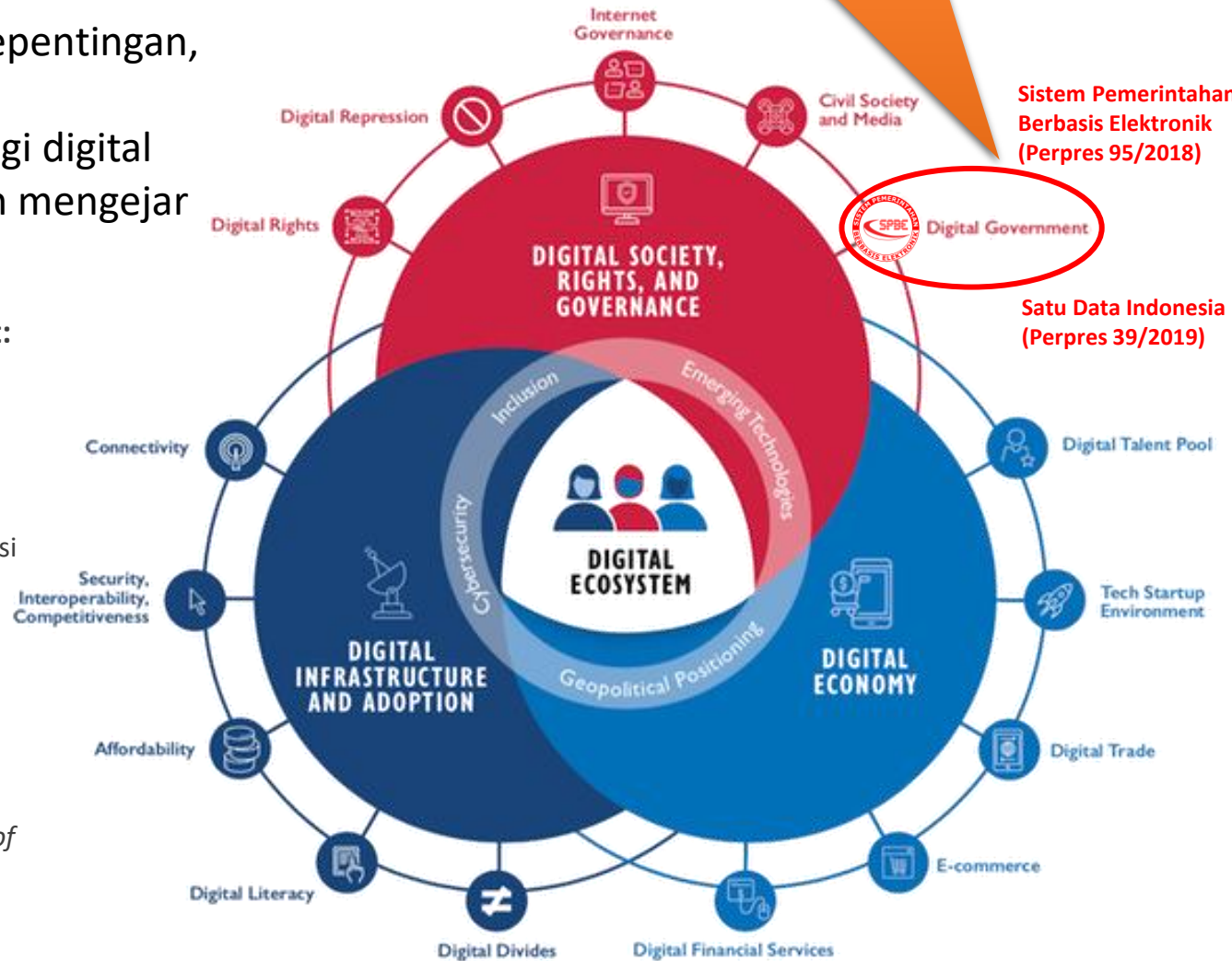
Ekosistem digital terdiri dari berbagai macam pemangku kepentingan, sistem, dan lingkungan yang saling mendukung, dengan memberdayakan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital untuk mengakses layanan, interaksi dalam masyarakat, dan mengejar peluang ekonomi.

Kerangka kerja Ekosistem Digital terbentuk dari 3 area yang saling terkait:

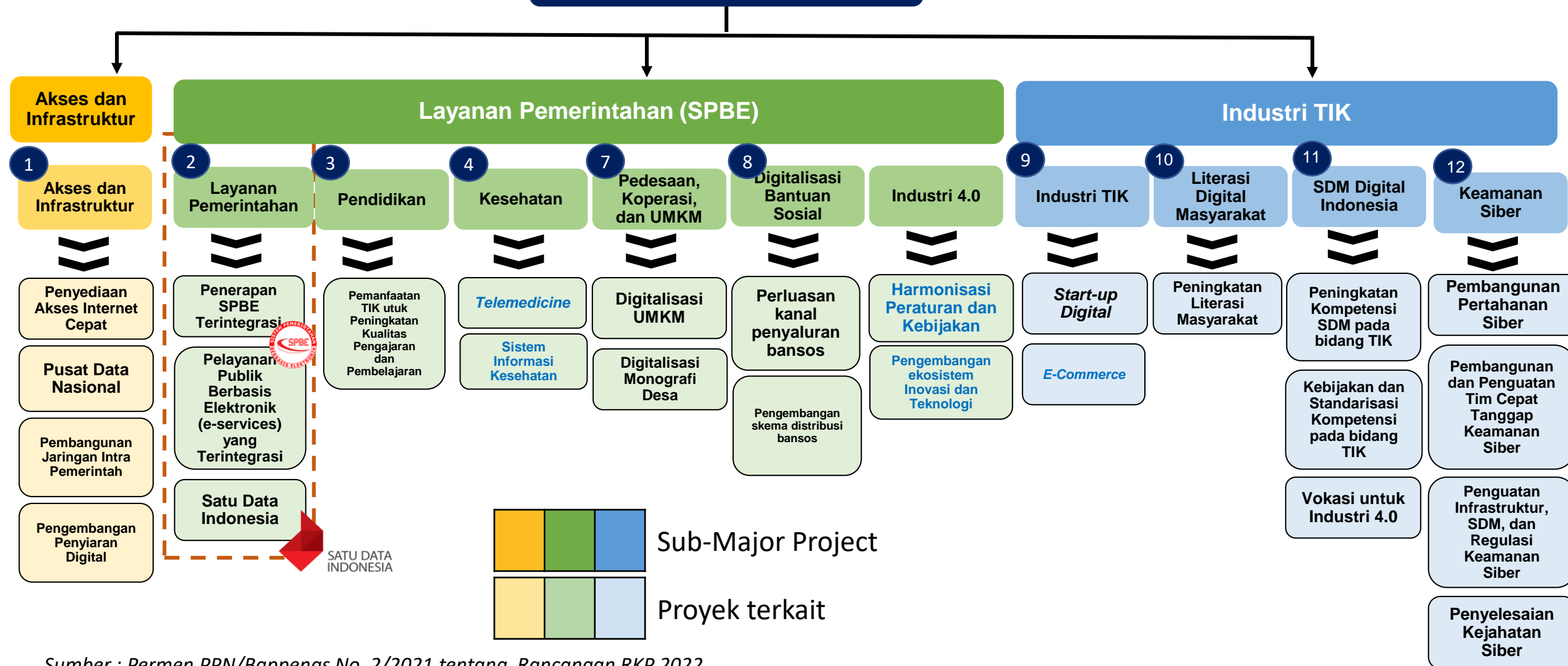
1. **Area Infrastruktur Digital dan Adopsi** : sumber daya yang memungkinkan sistem digital, masyarakat, serta organisasi untuk mengakses dan menggunakan infrastruktur digital.
2. **Masyarakat Digital, Hak, dan Tata Kelola**: interaksi teknologi digital dengan pemerintah, masyarakat, dan media.
3. **Ekonomi Digital**: peran teknologi digital dalam meningkatkan peluang dan efisiensi ekonomi

Kerangka kerja Ekosistem Digital mencakup 4 topik lintas area:

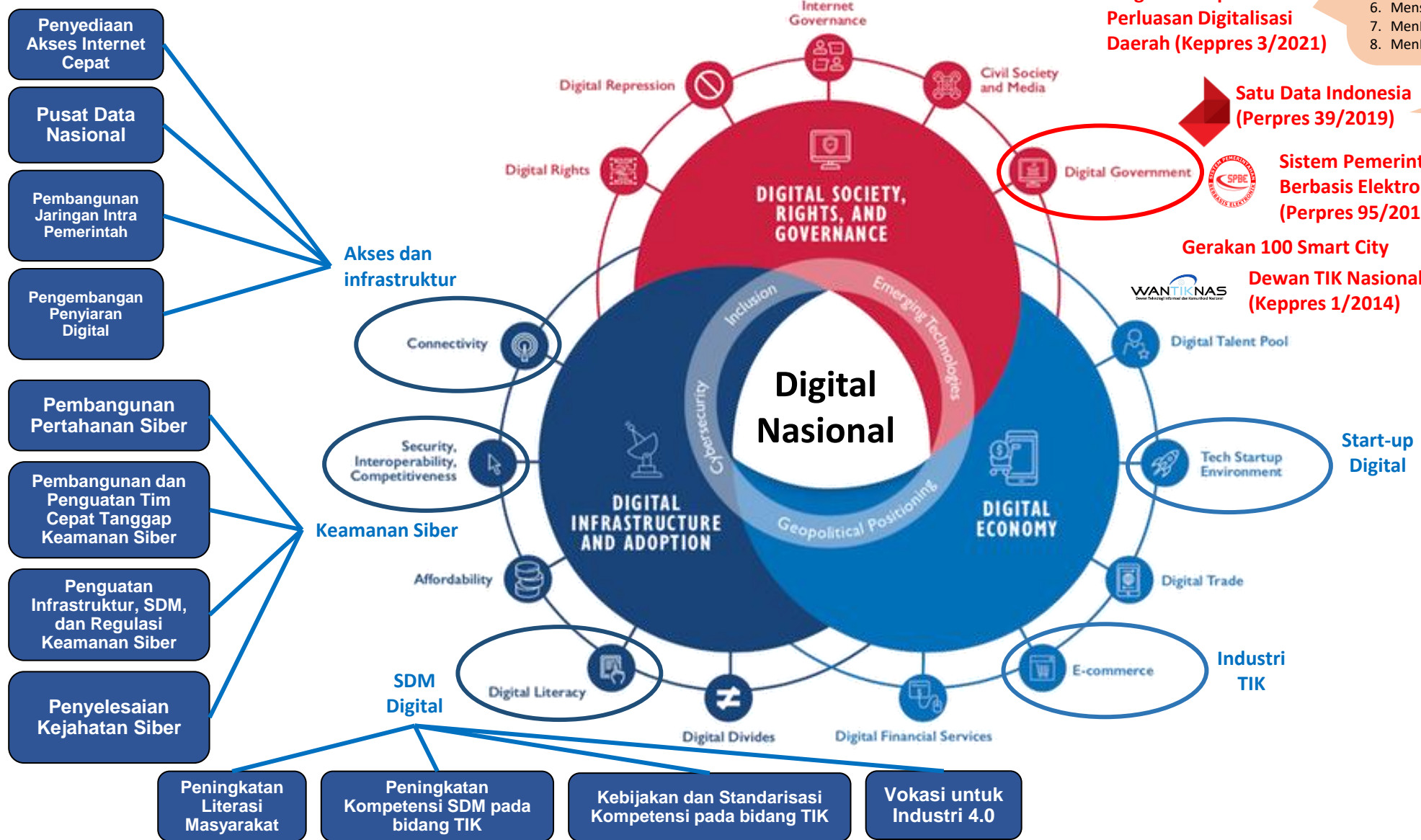
1. **Inklusi**: mengurangi disparitas dalam akses dan “kesenjangan digital”
2. **Keamanan siber**: melindungi informasi dari kerusakan, penggunaan atau modifikasi yang tidak sah, atau eksploitasi, serta ancaman keamanan informasi lainnya.
3. **Tren Teknologi (Emerging Technologies)**: mencakup kecerdasan buatan, *Internet of Things*, *blockchain*, 5G, dan teknologi baru lainnya.
4. **Geopolitik**: strategi geopolitik untuk berperan aktif dalam membentuk ruang digital global.



Transformasi Digital



EKOSISTEM DIGITAL NASIONAL (KERANGKA REGULASI PEMERINTAH)



- Satgas P2DD**
1. Menko Perekonomian
 2. Gubernur BI
 3. Mendagri
 4. Menkeu
 5. Menkominfo
 6. Mensetneg
 7. MenPANRB
 8. MenPPN

Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Keppres 3/2021)

Satu Data Indonesia (Perpres 39/2019)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Perpres 95/2018)

Gerakan 100 Smart City Dewan TIK Nasional (Keppres 1/2014)

- Dewan Pengarah SDI**
1. MenPPN
 2. MenPANRB
 3. Menkominfo
 4. Menkeu
 5. Mendagri
 6. Ka. BIG
 7. Ka. BPS

- Tim Koordinasi SPBE Nasional**
1. MenPANRB
 2. MenPPN
 3. Menkominfo
 4. Menkeu
 5. Mendagri
 6. Ka. BSSN
 7. Ka. BRIN

- Peningkatan Literasi Masyarakat
- Peningkatan Kompetensi SDM pada bidang TIK
- Kebijakan dan Standarisasi Kompetensi pada bidang TIK
- Vokasi untuk Industri 4.0

TAHAPAN PENERAPAN SPBE

FASE TRANSFORMASI

Capaian

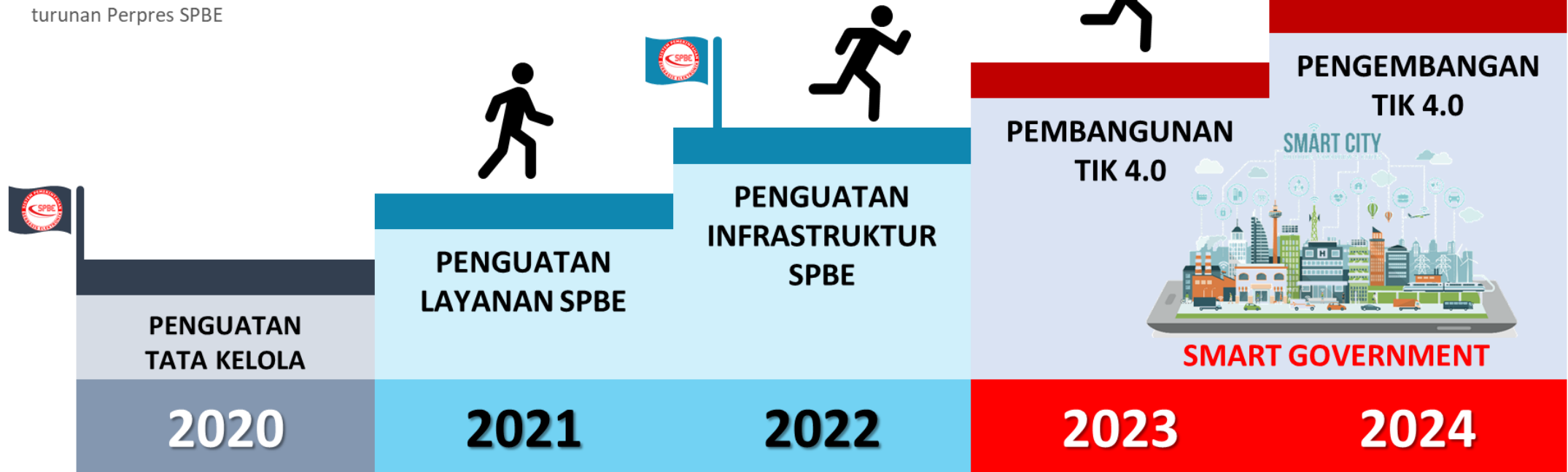
1. Peningkatan rata-rata indeks SPBE, tahun 2018: 1,98 (kurang) tahun 2019: 2,18 (cukup) tahun 2020: 2,26 (Cukup) tahun 2021: 2,24 (Cukup) dengan indikator penilaian baru, berprinsip keterpaduan nasional
2. Kenaikan 19 peringkat e-Government Development Index (UN), tahun 2018: 107, menjadi tahun 2020: 88
3. Penetapan berbagai kebijakan turunan Perpres SPBE

FASE TRANSFORMASI

- Terwujudnya **proses bisnis terintegrasi** melalui penerapan **Arsitektur SPBE**
- Terwujudnya **tematik layanan**
- Pemanfaatan **infrastruktur TIK Nasional Berbagi Pakai**
- **Peningkatan literasi digital** (Manajemen ASN Digital)

SMART Government

- Penerapan penuh **layanan digital publik dan administrasi pemerintahan nasional**
- Pemanfaatan Big Data dan Kecerdasan Artifisial (**Data-Driven Government**)
- Mewujudkan **konsep Smart City** dengan pola kerja digital (**New Way of Working**) pada operasional di Kota Nusantara tahun 2024





panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

**TERIMA
KASIH**